

## PETANI MELAWAN ARUS KAPITALISASI BANGSA



Henry Saragih  
Ketua Umum SPI  
(Serikat Petani Indonesia)

*"Cita-cita proklamasi kemerdekaan bukanlah sekadar memperoleh kemerdekaan politik, melainkan merombak struktur masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi suatu masyarakat yang adil dan bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia."*<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dikaruniai sumber daya yang berlimpah. Selain wilayah daratan yang membentang seluas 191 juta hektar, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang luasnya mencapai

3 kali lipat luas daratan. Lebih jauh, kondisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati kedua tertinggi di dunia setelah Brazil. Faktor inilah yang mendorong Indonesia menjadi negara agraris yang sangat produktif di dunia. Bahkan sejarah mencatat dari hasil pertanian Indonesialah pemerintah kolonialis mampu menutupi utang-utangnya dan menjadi salah satu negara kolonial yang kuat.

Hingga saat ini, Indonesia dinilai sebagai negara yang sangat berpotensi dalam pengembangan produksi pertanian. Bagaimana tidak, dari keseluruhan luas daratan, 70.8 juta hektar di antaranya merupakan wilayah yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budidaya seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan dan budidaya non-pertanian seperti pertambangan, pemukiman, dan industri.<sup>2</sup> Sementara itu, hingga saat ini masih terdapat sekitar 40.85 juta hektar luasan lahan yang menjadi potensi budidaya baik pertanian ataupun non pertanian. Selain faktor produksi tanah, sumberdaya manusia Indonesia juga turut

<sup>1</sup> Sritua Arief, *Negeri Terjajah; Menyingkap Illusi Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006)

<sup>2</sup> BPN, 2006

menambah potensi Indonesia sebagai negara penyedia faktor produksi dunia. Hingga saat ini, Indonesia memiliki penduduk tidak kurang dari 240 juta jiwa dan menempati urutan keempat dalam populasi di dunia. Dari angka tersebut, tercatat 46 persen rakyat Indonesia terlibat dalam sektor pertanian.

### Realitas Politik Pertanian Indonesia: Petani Versus Pengusaha

Fakta menunjukkan, 63,58 % dari rakyat miskin di Indonesia adalah rakyat yang tinggal di pedesaan di mana 70 persennya hidup dari pertanian.<sup>3</sup> Sebagian besar dari mereka adalah pelaku pertanian rakyat yang di antaranya adalah petani pangan berupa padi dan hortikultura, sementara lainnya di perkebunan, petani hutan, petani peternak dan petani perikanan skala kecil. Setengahnya dari petani itu adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha bahkan tuna kisma (tak bertanah), sehingga sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan.

Minimnya kepemilikan dan penguasaan lahan oleh petani serta tidak berpihaknya kebijakan pemerintah kepada petani menyebabkan pertanian dan pedesaan menjadi sektor dan wilayah yang tidak mampu memberikan penghi-

dupan yang layak. Kondisi ini akhirnya mendorong pada peningkatan angka pengangguran dan migrasi yang besar. Angka pengangguran telah meningkat dari 9,86 % pada tahun 2004 menjadi 10,28 % pada tahun 2006.<sup>4</sup> Dari angka tersebut, pengangguran di pedesaan mencapai 5,4 %. Artinya, dari keseluruhan pengangguran di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini pula yang akhirnya meningkatkan angka urbanisasi dengan segenap permasalahan sosial perkotaan lainnya.

Adalah suatu paradoks ketika melihat fakta-fakta tersebut di saat yang bersamaan pemerintah menyebutkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar dalam sumbangsinya terhadap GDP.<sup>5</sup> Di satu sisi sektor pertanian melaju dengan pesat, namun di sisi lain, petani sebagai pelaku terbesar malah semakin jauh dari kesejahteraan. Adalah fakta bahwa Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam perdagangan CPO (*Crude Palm Oil*/minyak sawit mentah kasar). Sementara itu perdagangan karet dunia yang hanya didominasi oleh Malaysia, Indonesia, dan Thailand turut menjadikan Indonesia sebagai produsen karet populer di dunia. Komoditas lain seperti kopi, coklat dan

<sup>3</sup> Diolah dari Badan Pusat statistik (BPS), 2003 dan 2007

<sup>4</sup> BPS 2004 dan 2006

<sup>5</sup> Laporan BPS pada triwulan terakhir 2007 menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 10.2 persen. BPS menyebutkan juga bahwa sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor yang lainnya.



dok. Lakpesdam

lada juga telah berkontribusi dalam angka pertumbuhan Indonesia. Seiring dengan peningkatan harga komoditas-komoditas ini di dunia di akhir tahun 2007, otomatis membuat sektor pertanian menjadi primadona dan alat mencapai devisa yang setinggi-tingginya. Namun, kemanakah aliran dana tersebut mengalir? Siapakah yang diuntungkan? Jawabannya terkait dengan politik pertanian Indonesia yang terjadi selama ini, tidak tepat sasaran.

Politik pertanian adalah perangkat kebijakan yang disusun untuk membangun sektor pertanian. Dalam implementasinya, politik pertanian terkait erat dengan struktur pertanian yang ada di suatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sektor pertanian Indonesia pada dasarnya terdiri dari dua struktur yang berbeda: *pertama*, struktur pertanian rakyat, *kedua*, struktur pertanian

agribisnis/perkebunan skala besar. Dalam konteks pertanian Indonesia, hingga saat ini pertanian rakyat masih menjadi ciri utama. Sebanyak 21.141.273 rumah tangga tani di Indonesia masih terlibat dalam rumah tangga pertanian rakyat.<sup>6</sup> Maka, merupakan hal yang masuk akal apabila pemerintah mendorong tercapainya kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian rakyat ini. Apalagi, sejarah mencatat bahwa perkebunan

besar tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sebaliknya, politik tanam paksa yang mewariskan ribuan hektar lahan perkebunan malah mensejahterakan pemerintah kolonial dan segelintir penguasa bumi putera saja.

Namun, sejarah justru tidak sungguh-sungguh dijadikan cermin oleh pemerintah sekarang ini. Pada akhirnya, potret kelam kehidupan petani kembali terulang sebagai akibat dari hadirnya para penjajah baru yaitu penguasa modal. Petani kecil semakin tersingkir dari akses penguasaan alat produksi seperti tanah, air, serta teknologi bahkan hingga ke masalah pemasaran. Dengan kekuatan modal, bahkan para pengusaha telah mengambil alih tugas petani sebagai penyedia pangan bangsa.

Saat ini, rakyat—terutama rakyat tani—tengah mengalami eksploitasi pasar,

<sup>6</sup> Sensus Pertanian tahun 2003

baik pasar sumberdaya alam ataupun pasar produk kapitalisme global, yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Apa yang ditakutkan para pendiri bangsa sekarang benar-benar terjadi, penjajahan masih terus berlangsung dengan adanya 3 (tiga) karakteristik yakni: (i) Diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi industri-industri di negara maju; (ii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk yang dihasilkan oleh industri-industri di negara maju; dan (iii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara maju.

Tidak jauh berbeda dengan masa kolonial, saat ini Indonesia yang menyimpan banyak potensi masih menjadi sasaran kepentingan ekonomi-politik penguasa dunia. Seperti apa yang diungkapkan oleh Multatuli, jika kekuatan kolonialis konservatif menginginkan semua keuntungan yang mungkin diperoleh dari Indonesia, maka kekuatan kolonialis liberalis seperti sekarang ini menginginkan apapun yang dapat diperoleh dari Indonesia. Melalui liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang dilakukan terhadap rezim perdagangan, keuangan, investasi, serta melalui kebijakan struktural pemerintahan kaum kolonialis liberalis yang tak lain adalah penguasa modal semakin meminggirkan kehidupan kaum miskin. Melalui rezim perdagangan (WTO),

petani telah dibantai melalui masuknya produk pertanian impor dengan harga yang jauh lebih murah. Melalui rezim investasi dan keuangan (IMF), peran pemerintah dalam melindungi petani semakin dilucuti dengan privatisasi Bulog dan penghapusan subsidi pupuk. Melalui Letter of Intence (LoI) yang ditandatangani tahun 1997, pemerintah telah mengubah struktur BULOG menjadi perusahaan umum yang semakin leluasa untuk meraup profit dengan mengabaikan fungsi PSO (*Public Service Obligation*)-nya.

Melalui rezim kebijakan (Bank Dunia/ADB/USAID), petani semakin dijauhkan dari alat-alat produksi melalui penyusunan kebijakan pertanahan, air dan sumber-sumber kekayaan alam yang liberal dan pro terhadap pemilik modal. Sebagai contoh, program WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*) yang diinisiasasi oleh Bank Dunia akhirnya melahirkan UU No. 7 tahun 2004 yang mengatur privatisasi air. Selain itu, kebijakan di sektor pertanahan sudah mulai digiring pada terciptanya pasar tanah melalui LAP (*Land Administration Project*) dan LMPDP (*Land Management Policy and Development Project*). Kebijakan pemerintah lainnya yang turut mengkatalisasi penggadaian bangsa terhadap kapitalisme global adalah UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Sekian abad perjalanan penjajahan

gaya baru ini telah membuahkan pada kian tergesurnya rakyat tani dari kehidupan yang layak. Ketiga bentuk penajahan gaya baru telah membuahkan pertentangan antara rakyat tani dengan para penguasa modal. Sementara itu, struktur pertanian Indonesia yang terdiri dari dua elemen ini akhirnya membuat

politik pertanian menjadi tidak konsisten. Di satu sisi menginginkan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain faktanya pertanian rakyat tergesur. sementara perusahaan agribisnis skala besar menjadi semakin berkuasa.

Tabel 1.  
Luas Perkebunan Sawit Milik Perusahaan Swasta & Swasta Asing di Indonesia

No	Perusahaan	Luas Lahan (ha)
1	Astra Argo Lestari Tbk	201.412
2	Asian Argo	150.000
3	SMART Tbk	102.556
4	PP Lonsum Tbk	59.253
5	Sucofindo Group	46.800
6	Kurnia Group	42.900
7	PT. Bakrie Sumatera Plantation	32.712
8	Guthrie	325.000
9	Golden Hope KL Kepong	53.500
10	PBB Oil Palms	110.000
11	Kulim Berhard	91.763
12	Oriental Holdings Berhard	35.900
13	Sime Darby Bhd	20.000
	<b>Total</b>	<b>825.621</b>

Sumber: Achmad Ya'kub, 2007

Tabel 2.  
Konglomerat Pada Pembangunan HTI

No	Nama	Jumlah Proyek	Luas Areal (Ha)	Persentase
1	Barito Pacific	4 unit	1.018.700	26,5
2	Kalimanis	4 unit	614.080	16,0
3	Raja Garuda Mas	2 unit	428.560	11,2
4	Dayak Besar	1 unit	376.000	9,8
5	Kayu Lapis Indonesia	1 unit	300.000	7,8
Sub Total		15 unit	2.737.340	71,3
Perusahaan lainnya		23 unit	1.104.437	28,7
Total		38 unit		100,0

Sumber: Hedar dan Arimbi HP, 1997 dalam Achmad Ya'kub 2007

Pada tabel 1, 2 dan 3 diperlihatkan penguasaan lahan perkebunan, lahan HTI dan kepemilikan lahan rata-rata di Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa proses kapitalisasi bangsa telah semakin memarginalkan petani. Angka luas lahan perkebunan ini dimungkinkan akan semakin meningkat

seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan suatu *holding company* untuk menambah luasannya hingga 100.000 hektar 2007 lalu. Sementara itu, luas kepemilikan lahan petani justru semakin menurun dan bahkan lebih kecil dari angka yang tercantum di tabel 2.

Tabel.3  
Luas kepemilikan lahan Indonesia

Tahun	Jawa	Luar Jawa
2003-2006	0.58 ha	1.38 ha
2007-....	0.3 ha	1.19 ha

Sumber: BPS dan sumber lainnya (diolah, 2007)

Tabel.4  
Jumlah kasus konflik agraria 2007

Kasus	Luasan Lahan Kriminalisasi	Petani Tergusur	Luka-Luka Tewas
76 buah	196.179 ha	166 orang	24.257 KK 12 orang 8 orang

Sumber: Kompilasi data SPI (2007)

Kapitalisasi pertanian telah menggusur kehidupan para petani melalui mekanisme di atas. Konflik-konflik agraria semakin meningkat akibat semakin luasnya kasus perampasan tanah terutama dalam sektor perkebunan dan kehutanan. Sementara itu, realita yang terjadi saat ini terkait peningkatan harga komoditas perkebunan ternyata hanya menguntungkan segelintir pengusaha perkebunan saja. Di lain pihak, peningkatan harga ini malah membuat rakyat tani dan masyarakat miskin lainnya semakin menderita. Akibat kepentingan profit, perusahaan agribisnis besar membuat harga pangan semakin meningkat dan membuat rakyat miskin—termasuk petani yang telah menjadi *net consumer* bahan pangan—menjadi semakin sulit dalam mengakses

pangan. Hal ini telah membuktikan bahwa dari berbagai fase perjalanan bangsa Indonesia mulai dari zaman feodal, kolonial, liberalisasi, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan politik pertanian masih tak kunjung berpihak pada para rakyat tani. Pertanian rakyat yang menjadi ciri sistem pertanian di Indonesia kini terancam terkalahkan oleh kepentingan para pelaku usaha agribisnis skala besar.

### Kapitalisme Pertanian Global: Eksplotasi Manusia Atas Manusia

Tatanan dunia yang sudah mengabaikan batas-batas antar negara saat ini telah mengkatalisasi proses perluasan pasar demi keuntungan segelintir pihak yang bermain melalui mekanisme bisnis dan perdagangan Internasional. Dalam

## Globalisasi Pertanian : Mekanisme kebijakan Neokolonialisme



kasus Indonesia ditunjukkan bagaimana petani hampir disingkirkan oleh kepentingan-kepentingan modal dari segelintir orang tertentu. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kondisi di tingkat internasional itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya perekonomian dunia, maka pola hubungan antar negara pun ikut bertransformasi. Bergesernya pola hubungan ekonomi politik antarnegara dari sistem kolonialisme kuno telah menjadikan negara-negara “muda” kembali menjadi sasaran kolonialisme gaya baru: penjajahan untuk kepentingan pasar. Penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa di satu sisi telah menjadi potensi produksi yang luar biasa, namun dalam waktu bersamaan menjadi potensi konsumsi yang sangat besar. Perkembangan ekonomi pasar yang menjadi tanda dari tumbuh dan mapannya ekonomi kapitalisme telah menjadikan negara-negara ‘muda’ sebagai pasar bagi produk kapitalisme global.

Lahirnya globalisasi yang berimbas pada semakin menipisnya batas antar-dunia telah membawa pelaku usaha sebagai agen yang mampu menembus batas-batas negara. Bangkitnya neokolonialisme yang bergerak dalam menyukkseskan perluasan pasar telah membawa para pelaku usaha sebagai budak kapitalisme. Lingkup usaha pun semakin

meluas, dari yang tadinya hanya sebagai pelaku usaha pribumi, kini berkembang menjadi pelaku usaha kaki tangan perusahaan multi/transnasional (TNC/MNC) yang melakukan penjajahan untuk kepentingan perluasan pasar. Penjajahan gaya baru ini—neokolonialisme—telah berlaku semenjak paradigma pembangunan yang disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mengkatalisasi kepentingan pihak penguasa modal dijadikan dogma pembangunan. Perusahaan TNC/MNC telah berhasil menyusupi kebijakan-kebijakan menyangkut pertanian melalui lembaga internasional dan pemerintahan suatu negara. Melalui paradigma *developmentalism*<sup>7</sup> TNC/MNC memperalat lembaga internasional dan pemerintah untuk menjadi pihak yang membantu pengumpulan profit. Sebagai “*homo economicus*” para pelaku usaha yang menjadi agen dari sistem kapitalisme bekerja untuk meraih profit semaksimal mungkin. Jelas, keberadaan pelaku usaha yang menjadi representasi mode produksi yang menindas ini telah meningkatkan kondisi ketidakadilan baik dalam penguasaan alat produksi maupun dalam penguasaan simpul ekonomi pasar.

TNC/MNC semakin hari semakin menguasai simpul-simpul pasar pangan dunia. Sebagai contoh dalam tata niaga

<sup>7</sup> Paradigma *developmentalism* adalah paradigma pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan. Kesejahteraan suatu bangsa diukur dari laju pertumbuhan ekonominya yang diperoleh dari perhitungan *output* nasional dengan menjumlahkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan hasil ekspor impor. Oleh karena itu, untuk mendapatkan angka pertumbuhan yang tinggi, pemerintah menggenjot investasi dan ekspor dengan cepat. Paradigma ini dicirikan dengan adanya industrialisasi yang meluas di seluruh sektor ekonomi.

kedelai Brazil, industri penggilingan kedelai di Brazil hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar salah satunya adalah Cargill Brazil. Sementara itu, sesampainya di negara pengimpor, lagi-lagi rantai perdagangan dimonopoli oleh 3 perusahaan besar dan salah satunya adalah Cargill, bisa dibayangkan berapa persen dari margin perdagangan tersebut yang masuk ke kantong Cargill dan perusahaan agribisnis raksasa lainnya.

Kenyataan lainnya adalah dominasi korporasi agribisnis multi nasional dalam industri pangan, termasuk industri benih. Pada tahun 2004, pendapatan perusahaan agribisnis dunia di bidang bisnis pengolah-

an makanan mencapai angka 1.25 triliun dolar; bisnis pengecer makanan sebesar 3.5 triliun dolar; bisnis benih sebesar 31 milyar dolar dan bisnis agrokimia sebesar 35 milyar dolar. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan GDP Ghana tahun 2006 yang hanya mencapai 12 milyar dolar dan GDP Timor Leste 2006 yang hanya mencapai 0.356 milyar dolar.

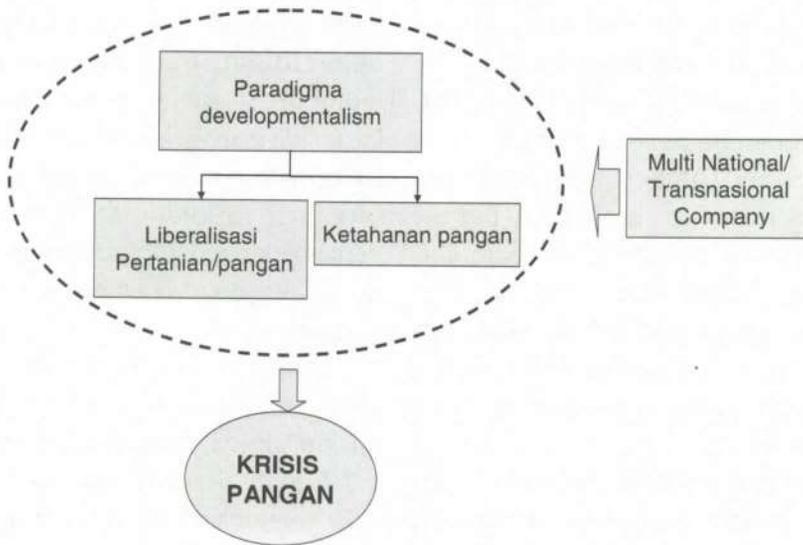
Dalam konteks pertanian dan pangan, krisis pangan yang mulai digembor-gemborkan akhir-akhir ini tidak lain merupakan ulah TNC/MNC di bidang pangan dan pertanian. Melalui liberalisasi pertanian dan konsep ketahanan pangan,<sup>8</sup> TNC/MNC dengan mudahnya

#### World's Top 10 Seed Companies Based On 2006 Seed Revenues

Company	2006 Seed Sales US \$ millions
1. Monsanto (US)	\$ 4,028
2. Dupont (US)	\$ 2,781
3. Syngenta (Switzerland)	\$ 1,743
4. Groupe Limagrain (France)	\$1.035
5. Land O' Lakes (US)	\$756
6. KWS AG (Germany)	\$615
7. Bayer Crop Science (Germany)	\$430
8. Delta & Pine land (US)(acquisition by Monsanto pending)	\$418
9. Sakata (Japan)	\$401
10. DLF-Trifolium (Denmark)	\$352

Sumber: ETC Group

<sup>8</sup> Konsep ketahanan pangan hanya terbatas pada "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau". Konsep ini persis dengan konsep ketahanan pangan yang dicanangkan oleh FAO, yaitu



mengabaikan perut milyaran orang penduduk dunia demi kepentingan profitnya. Dalam hal pemenuhan pangan, lambat laun fungsi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan telah dirampas oleh korporasi agribisnis raksasa seperti Monsanto, Cargill, Del Monte dsb. Produksi pangan ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Terbukti, meningkatnya trend *agrofuel* telah membuat perusahaan agribisnis seperti Monsanto dan Cargill mengkonversi lahan tanaman kedelai dan gandumnya menjadi tanaman jagung. Sontak hal ini meningkatkan harga kedelai dan gandum di tingkat internasional dan semakin meminggirkan ka-

um miskin termasuk kaum tani yang saat ini sudah menjadi *net consumer* produk pangan. Inilah suatu bentuk eksploitasi manusia atas manusia—*homo homini lupus*.

### Pembaruan Agraria: Solusi untuk Kedaulatan Rakyat

Redistribusi penguasaan alat produksi menjadi solusi tepat dalam menghadapi realitas ketidakadilan dan eksploitasi manusia atas manusia yang terjadi saat ini. Sistem ekonomi dan tatanan global yang telah memarginalkan kaum miskin – termasuk kaum tani—harus segera ditata ulang untuk memberikan kesempatan dan

---

tanpa melihat dari mana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan. Dalam ketahanan pangan, suatu negara dikatakan aman apabila mampu memenuhi pangannya tanpa dia memproduksi sendiri pangan tersebut. Artinya, suatu negara boleh menggantungkan pemenuhan pangannya terhadap negara lain melalui mekanisme impor.

peluang yang adil bagi rakyat. Terkait dengan realitas krisis pangan dan pertanian, kaum tani memandang bahwa inilah akibat dari terampasnya alat-alat produksi penyedia pangan. Untuk itu, struktur penguasaan atas alat-alat produksi—sumber-sumber agraria—harus segera dirombak. Selanjutnya petani sebagai penghasil pangan harus memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi yaitu melalui pelaksanaan reforma agraria yang berprinsipkan pada asas keadilan.<sup>9</sup>

Penegakan reforma agraria akan berjalan seiring dengan tercapainya kedaulatan pangan dan akan mampu mengkatalisator proses pembangunan daerah pedesaan yang saat ini dikenal sebagai kantong-kantong kemiskinan. Dalam pembangunan pedesaan sendiri, diperlukan penguatan sektor pertanian untuk memperkuat kondisi pangan lokal, yang diikuti oleh pembangunan sektor non pertanian yang tetap berbasiskan pada sektor pertanian dengan pengelolaan sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan dan berdasarkan perekonomian rakyat.

Dalam format reforma agraria, pengelolaan kekayaan alam—sumber-sumber agraria—dilakukan berdasarkan pada latar

belakang kebudayaan, sejarah, pengetahuan-pengetahuan lokal dan mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan didasarkan pada prinsip keadilan dan solidaritas. Reforma agraria sendiri menekankan pada tercapainya kedaulatan petani dalam pencapaian kedaulatan pangan yang akan membawa pada terjaminnya kedaulatan bangsa.

Realitas kesenjangan sosial dan ekonomi antara rakyat tani dan kaum miskin lainnya dengan segelintir penguasa dan pengusaha saat ini tidak akan begitu saja terselesaikan setelah redistribusi sumber-sumber agraria yang ada. Penataan selanjutnya yang wajib dilakukan untuk menjamin tercapainya keadilan adalah bagaimana sumber-sumber agraria yang sudah dimiliki rakyat tani dan kaum miskin tidak jatuh kembali ke tangan penguasa modal. Untuk itu, perlu dilakukan penataan mode produksi yang berpihak kepada rakyat tani dan kaum miskin. Melalui subsidi dan kredit, transformasi teknologi, penguatan dan pembangunan industri yang berbasiskan pertanian sebagai sektor primer, serta pemberian akses dan perlindungan pasar, maka keberlangsungan pembangunan akan tercipta secara berkesinambungan.

---

<sup>9</sup> Reforma agraria bertugas untuk menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

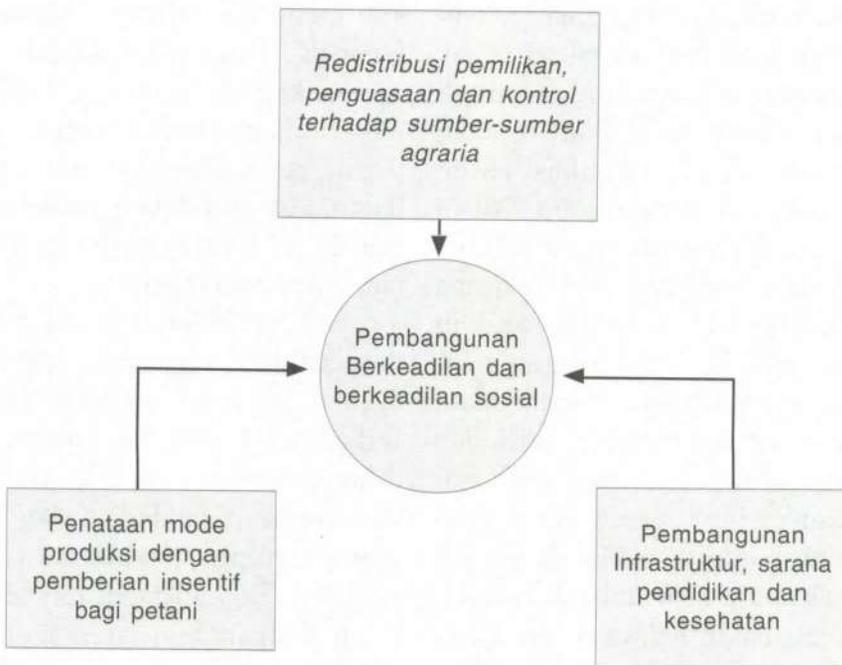
Selanjutnya, pembangunan mode produksi tidak akan berlangsung dengan baik apabila infrastruktur, sarana pendidikan, dan kesehatan tidak dibangun.

Pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan pada hakikatnya bermuara pada tercapainya kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat memperoleh harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang merdeka dan terbebas dari penjajahan dan eksploitasi. Kedaulatan tidak hanya terbatas pada satu sisi kehidupan ekonomi saja. Oleh karena itu, sistem pembangunan ini harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hak atas pangan, hak atas sumber daya dan lingkungan hidup, hak atas tanah, dan hak atas air, hak atas

kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, dan hak berpartisipasi haruslah menjadi kerangka pembangunan untuk kedaulatan rakyat.

### Bgaimana NU Mewujudkan Ekonomi Mandiri di Tangan Rakyat?

Perekonomian yang mandiri dan berada dalam genggaman tangan rakyat merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Bahkan, para pendiri bangsa telah menegaskan peranan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konstitusi negara, UUD 1945. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama.



Secara filosofis, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Tiga unsur dalam agama meliputi manusia, penghambaan, dan Tuhan. Proses penghambaan sendiri tercermin dari sikap menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan dan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Terdapat dua hal yang diatur dalam agama. *Pertama*, menyangkut ritual, dan *kedua* menyangkut sosial yang ujungnya adalah membawa pada proses perbaikan perilaku. Untuk itulah setiap umat beragama diwajibkan untuk saling mengingatkan dan mengajak ke arah perbaikan perilaku tersebut.

Dalam konsep penghambaan, Tuhan telah menjanjikan utusannya untuk menjadi pembimbing atau pemberi peringatan ketika suatu tatanan masyarakat berada dalam krisis moral dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya perintah dari Tuhan untuk melakukan gerakan transformasi dengan implikasi sosial ekonomi yang sangat mendalam. Dalam perkembangan penyebaran agama, beberapa perlawanan terhadap ajaran agama pada dasarnya bukan berlandaskan penolakan terhadap konsep ketuhanannya sendiri, namun justru pada implikasi dari ajaran agama tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi. Sebagai contoh ketika penyebaran Islam dilakukan, kaum hartawan di Mekah menjadi salah satu kaum yang memberikan perlawanan kuat. Fakta bahwa dalam Islam terdapat perintah untuk zakat membuat kaum hartawan merasa ketakutan karena

tidak bisa mengakumulasi lagi kekayaannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi transformasi sosial.

Jika kita telusuri sejarah Islam, maka dapat ditemukan bahwa Islam hadir di tengah tingginya polarisasi sosial ekonomi masyarakat Mekah. Setelah kedatangan Islam, larangan untuk menumpuk kekayaan dan diiringi perintah untuk menafkahkan sebagian dari apa yang kita cintai. Bahkan dalam surah Al-Hasyr, Islam juga melarang adanya pemusatan kekayaan hanya pada sekelompok orang tertentu. Inilah yang menjadi dasar bahwa sebuah agama pada hakikatnya adalah sebuah pembebas dari eksploitasi dan ketidakadilan dalam umat manusia. Merujuk fungsi hakiki agama sebagai pembebas dari rezim ketidakadilan, maka dalam Islam kita mengenal prinsip "*Mabadi Khairi Ummah*". Prinsip ini adalah jaminan agama kepada umatnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Adapun dalam pelaksanaannya, prinsip ini harus dijunjung tinggi oleh para pemimpin umat.

Lalu bagaimana peran NU dalam menegakkan apa yang diperintahkan agama? Sebagai organisasi massa Islam terbesar, NU memiliki peran strategis dalam proses penegakan keadilan melalui mekanisme perombakan dan penataan ulang struktur penguasaan alat-alat produksi. Sejarah mencatat bahwa NU telah dengan konsisten menyerukan massanya untuk memerangi segala bentuk penjajahan melalui fatwa-fatwanya. Hal



ini menunjukkan konsistensi perjuangan NU dan massa organisasinya. Sejarah juga menunjukkan bahwa NU telah berperan aktif dalam upaya pelaksanaan reforma agraria yang dibuktikan dengan keberhasilannya menjadikan nafas Islam dalam kandungan UUPA 1960. Hadis Nabi Saw menyebutkan bahwa *"Tanah untuk digarap oleh penggarap, apabila tidak, maka tanah tersebut harus diberikan kepada penggarap yang mau menggarap"* berhasil dijadikan sebagai prinsip dasar UUPA. Hal ini tidak lepas dari peran dan perjuangan NU melalui wakilnya KH. Zainul Arifin yang menjadi pimpinan dalam sidang parlemen gotong royong untuk pengesahan UUPA 1960 sebagai dasar pelaksanaan reforma agraria. Namun demikian, dalam perjalanannya, reforma agraria tak kunjung dilaku-

kan. Perjuangan yang dilakukan oleh kaum tertindas masih belum juga terselesaikan. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan niatnya dalam memenuhi kebutuhan umatnya. Lalu apa yang bisa dilakukan NU dalam konteks penegakan keadilan dalam penguasaan sumber-sumber agraria ini?

Terkait dengan posisi strategis yang dimiliki NU, maka terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan NU dalam kerangka reforma agraria, di antaranya adalah mengeluarkan fatwa mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sumber agraria terutama untuk tanah. Batas minimum ditentukan untuk membatasi luasan lahan minimum yang digarap oleh petani untuk memenuhi hak-hak dasarnya dan memenuhi syarat hidup

layak minimum. Sementara itu, pembatasan maksimal ditentukan terhadap sejumlah perusahaan agribisnis dan segelintir orang pemilik dan pihak yang menguasai hak kelola tanah. Melalui pembatasan maksimal ini, maka akan diperoleh tanah yang bisa didistribusikan kepada petani/penggarap sesuai dengan perspektif Islam dan tertuang dalam UUPA, yaitu tanah untuk penggarap. Selanjutnya, mengenai penggunaan sumber agraria lainnya bagi petani seperti air, benih, dan teknologi harus dipergunakan seadil-adilnya.

Selain itu, NU perlu mengeluarkan seruan dan menuntut kepada pemerintah untuk memberikan subsidi, teknologi terapan berbasis lokal dan akses perlindungan pasar kepada petani. Dengan pemberian subsidi, teknologi, dan akses perlindungan pasar kepada petani, maka pemerintah memberikan perlindungan pangan terhadap seluruh rakyatnya. Bagi petani, sebagai produsen pangan, perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh petani akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang akan membawa imbas pada peningkatan kesejahteraan di wilayah pedesaan.

Tidak hanya seruan agar pemerintah memberikan subsidi, NU juga mendesak pemerintah untuk membangun infrastruktur, sarana pendidikan dan sarana kesehatan di pedesaan. Infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang harus dibangun guna berjalan dan tercapainya pembangunan pedesaan. Infrastruktur seperti jalan raya, pengairan, irigasi, sarana kesehatan dan sarana pendidikan menjadi

katalistor dalam pembangunan pangan, pertanian, dan pedesaan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, NU harus melawan segala bentuk penjajahan gaya baru yang masuk melalui rezim perdagangan, budaya, sektor keuangan—pinjaman hutang, dan berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat miskin. Penjajahan gaya baru ini masuk melalui sektor ekonomi, sosial dan budaya. Tanpa disadari, penjajahan mental seperti gaya hidup konsumerisme dan “*luar negeri*” oriented telah mendorong pada penjajahan ekonomi. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan menggadaikan seluruh aset bangsa yang sebenarnya bisa kita kelola sendiri tanpa harus menggadaikannya pada negara lain hanya untuk mendapatkan modal *cash*. Investasi asing sebagai salah satu bentuk penjajahan gaya baru harus diwaspadai mengingat mudratnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Dengan segala upaya itu, diharapkan penindasan manusia atas manusia tidak terjadi. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kapitalisasi bangsa yang jelas-jelas mendorong pada sistem eksploitasi manusia atas manusia harus terus diperjuangkan. Kapitalisasi dunia sudah terbukti menghegemoni manusia untuk saling berkompetisi dan melupakan kodrat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Untuk mencegah hal yang lebih buruk, mari kita kembalikan pangan dan pertanian pada petani. Jalankan reforma agraria, tegakkan kedaulatan petani, tegakkan kedaulatan pangan, dan tegakkan kedaulatan bangsa. ❖